

**PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)  
TERHADAP KEMANDIRIAN FISKAL DAERAH  
KABUPATEN JEMBER**

*THE EFFECT OF GROSS REGIONAL DOMESTIC PRODUCT (GRDP)  
ON LOCAL FISCAL INDEPENDENCE OF JEMBER REGENCY*

Titin Kartika Putri, Boedijono, Hermanto Rohman  
Jurusan Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember (UNEJ)  
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121  
[Email:kartika\\_0712@yahoo.com](mailto:kartika_0712@yahoo.com)

**Abstract**

This research aimed to analyze the effect of Gross Regional Domestic Product (GRDP) on local fiscal independence of Jember Regency in 2007-2011. Jember Regency is an area with high level of economy in Ex-Besuki Residency region but, in fact, has not been able to make Jember become a fiscally independent region. The proportion of local revenue is still below 10% whereas the value of GRDP each year increases. The increased GRDP should be able to boost the increased local revenue. This is because local revenue is highly dependent on how far the region could boost economic growth in the region. This type of research was descriptive with quantitative and qualitative approaches. Data collection techniques used primary data by interview and secondary data by documentation and literature study. Data analysis used qualitative and quantitative data by regression analysis and Klassen's typology. The research results showed that there was no significant effect of GRDP on local fiscal independence. This was because the rate of GRDP growth was relatively slow in increasing local revenue. Thus, even if GDP continued to rise, it was not seen in local revenue increase. Identification of each sector indicated that the sectors of trade, hotel and restaurant were in the leading sector category. For years 2012-2016 projection, it was shown that GRDP and local revenue had increased but still needed 19% in increasing GRDP in order to achieve fiscal independence of Jember Regency.

**Keywords:** grdp, local fiscal independence, local revenue

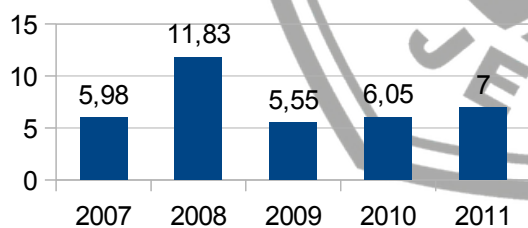
## Pendahuluan

Sejak diberlakukannya otonomi daerah yang diberikan pemerintah kepada daerah otonom, merupakan langkah strategis bagi setiap daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya. Otonomi yang diberikan kepada daerah didasarkan atas asas desentralisasi dalam wujud kewenangan otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada pemerintah daerah secara proporsional.

Dalam hal pelaksanaan otonomi daerah, fiskal merupakan faktor utama dalam penyelenggaraan kehidupan daerah. Otonomi daerah yang baik tercermin dari pengelolaan keuangan daerah yang baik serta mampu meminimalisir ketergantungan bantuan keuangan dari pusat. Oleh karena itu, daerah harus bisa memaksimalkan PAD guna terwujudnya kemandirian fiskal daerah.

Menurut Munir dalam Hanafi & Mugroho (2009:56), kemandirian fiskal yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. Pada dasarnya peningkatan PAD tidak hanya meningkatkan pajak daerah atau retribusi saja, melainkan dapat juga dengan cara meningkatkan PDRB. Menurut Saragih(2003:58), jika PDRB meningkat maka hal ini mengindikasikan akan mendorong peningkatan PAD. Widjaja (2007:80) juga menyatakan hal serupa bahwa untuk meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan PDRB.

Kabupaten Jember, merupakan salah satu daerah yang memiliki kondisi perekonomian cukup baik. Hal ini dapat terlihat dari trend pertumbuhan PDRB



Kabupaten Jember tahun 2007-2011.  
Gambar 1.1 Tren Pertumbuhan PDRB  
Sumber: PDRB Kab. Jember 2011

Dari gambar tersebut, terlihat bahwa PDRB Kab. Jember tiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, kontribusi PAD yang didapat oleh Jember masih di bawah 10% dan masih didominasi oleh dana dari pusat. Berikut realisasi penerimaan Kabupaten Jember tahun 2007-2011.

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Kabupaten Jember Tahun 2007-2011

Tahun	Jenis Penerimaan (%)			
	PAD	DAPER	Lain2	Jumlah
2007	8,01	88,19	3,80	100
2008	10,65	83,64	5,71	100
2009	10,08	81,11	8,81	100
2010	9,97	73,27	16,76	100
2011	9,70	66,45	23,85	100
<b>Rata2</b>	<b>9,68</b>	<b>78,53</b>	<b>11,79</b>	<b>100</b>

Sumber: DISPENDA Kab. Jember (2013)

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerimaan dana perimbangan lebih dari 50%, sedangkan untuk PAD sebesar 9%. Padahal syarat agar suatu daerah dapat dikatakan mandiri secara fiskal apabila daerah tersebut memiliki kontribusi PAD terhadap total penerimaan daerah minimal sebesar 30% (Widjaja, 2003:41).

Berdasar pada hal di atas, maka perlu dilakukan penghitungan secara cermat dan teliti guna mengetahui berapa besar sebenarnya pengaruh PDRB terhadap PAD di Kabupaten Jember. Sehingga dapat diketahui penyebab kecilnya PAD padahal PDRB meningkat tiap tahunnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Jember".

## Tinjauan Pustaka

### a. Otonomi Daerah

Menurut Hanafi dan Mugroho (2009:8), otonomi daerah adalah otonomi yang seluas-luasnya. Artinya adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu untuk mencapai tujuan pemberian otonomi, yaitu peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi keadilan dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

Dalam Widjaja (2011:15), prasyarat yang harus dipenuhi sebagai daerah otonom, yaitu:

- Adanya kesiapan Sumber Daya Manusia aparatur yang berkeahlian;
- Adanya sumber dana yang pasti untuk membiayai berbagai urusan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah;
- Tersedianya fasilitas pendukung pelaksanaan pemerintahan daerah;

- d. Otonomi daerah yang diterapkan adalah otonomi dalam koridor NKRI.

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa salah satu prasyarat daerah otonom adalah tersedianya sumber dana yang cukup memadai. Artinya bahwa daerah otonom tersebut harus mampu mengetahui kemampuan daerahnya sehingga nantinya daerah dapat menggali sumber keuangan sendiri tanpa menggantungkan pada bantuan dari pemerintah pusat.

#### **b. Keuangan Daerah**

Menurut Mamesah (1995:16) keuangan adalah rangkaian kegiatan dan prosedur dalam mengelola keuangan (baik penerimaan maupun pembiayaan) secara tertib, sah, hemat, berdaya guna dan berhasil guna. Sedangkan keuangan daerah merupakan “semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh Negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku”.

#### **c. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Salah satu indikator penting dalam menentukan arah pembangunan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai alat untuk mengetahui struktur ekonomi suatu wilayah. Total nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah (regional) tertentu dalam waktu tertentu (satu tahun) dihitung sebagai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya (PDRB, 2011:4).

#### **d. Kemandirian Fiskal Daerah**

Menurut Munir dalam Hanafi & Mugroho (2009:56), kemandirian fiskal yaitu kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan PAD. Kemampuan daerah dalam memobilisasi pendapatan asli daerah diukur melalui peranan PAD dalam membiayai pengeluaran rutin masing-masing daerah.

Kemampuan keuangan daerah mengandung arti kemampuan daerah kabupaten dan kota untuk membiayai urusan-urusan rumah tangganya dalam melaksanakan pemerintahan yang berasal dari PAD nya. Asumsi bahwa jika PAD di bawah 30% dari APBD, maka keputusan-keputusan di tingkat lokal didominasi oleh pemerintah pusat. Hal ini akan mengurangi kredibilitas, kemandirian, dan kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Semakin besar kontribusi PAD terhadap APBD, semakin menunjukkan bobot kemandirian dan kemampuan daerah dalam membiayai urusan-urusan rumah tangganya.

#### **e. Pengaruh PDRB Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah**

Menurut Saragih (2003:55). Keberhasilan otonomi daerah diukur dari seberapa besar porsi sumbangan masyarakat lokal terhadap pertumbuhan

ekonomi daerah atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Jika PDRB meningkat, maka hal ini akan mengindikasikan akan mendorong peningkatan PAD. Diyakini bahwa terdapat korelasi antara pertumbuhan ekonomi daerah dengan penerimaan daerah dari pajak dan retribusi daerah.

Widjaja (2007:80) menyatakan bahwa sebenarnya bukanlah PAD yang dipacu jika jika membebani masyarakat, tetapi meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Banyak hal yang dapat dikembangkan, tergantung kreativitas daerah.

### **Metode Penelitian**

#### **a. Jenis Penelitian**

Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif.

#### **b. Tempat dan Waktu Penelitian**

Peneliti melakukan penelitian pada tahun 2013 yang berlokasi di Dinas Pendapatan Daerah; Dinas Perdagangan, Perindustrian, dan ESMD; Badan Perencanaan dan Pembangunan Kabupaten (BAPPEKAB); Dinas Pertanian Kabupaten Jember.

#### **c. Variabel dan Definisi Operasional**

Variabelnya adalah variabel independen (bebas) yaitu PDRB dan variabel dependen (terikat) yaitu kemandirian fiskal daerah. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Bebas (X), yaitu PDRB. Indikator untuk mengukur pertumbuhan PDRB tiap-tiap sektor atau lapangan usaha dapat diketahui dengan membandingkan PDRB pada satu tahun tertentu ( $PDRB_t$ ) dengan PDRB tahun sebelumnya ( $PDRB_{t-1}$ ) dalam satuan persentase (%). (Jhingan dalam Prabandari, 2011:7);
2. Variabel Terikat (Y), yaitu variabel kemandirian fiskal daerah yaitu kemampuan daerah dalam membiayai pembangunan daerahnya dan dinyatakan dengan derajat desentralisasi fiskal. Adapun indikator untuk mengukur kemandirian keuangan daerah adalah rasio antara Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan Total Penerimaan Daerah (TPD) dalam satuan persentase (%). (Halim, 2001:39).

#### **d. Penentuan Informan**

1. Staff Adminitrasi DISPENDA Kab. Jember;
2. Kepala Bidang dan Staff Litbang BAPPEKAB Jember; Dinas Perdagangan, Prindustrian, dan ESMD; Dinas Pertanian.

#### **e. Jenis dan Sumber Data**

Data primer diperoleh dari hasil wawancara kepada para informan. Data sekunder diperoleh dari dokumen berupa data tentang APBD dan PDRB Kab. Jember.

#### f. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan.

#### g. Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan dua teknik analisis data yaitu analisis data kualitatif model Miles dan Huberman serta analisis data kuantitatif dengan rumus sebagai berikut.

#### Analisis Regresi

Tujuan dari analisis ini adalah untuk memprediksi hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas (PDRB) dan terikat (kemandirian fiskal daerah) mempunyai pengaruh atau tidak. Peneliti menggunakan analisis regresi sederhana dengan data ratio dihitung menggunakan software SPSS 17. Rumus yang digunakan:

##### 1. Laju Pertumbuhan PDRB

$$\Sigma PDRB = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\%$$

Sumber: Jhingan dalam Prabandari (2011:7)

Keterangan:

$\Sigma PDRB$  = laju pertumbuhan PDRB

$PDRB_t$  = PDRB pada satu tahun tertentu

$PDRB_{t-1}$  = PDRB pada tahun sebelumnya

##### 2. Derajat Desentralisasi Fiskal

$$DDFD = \frac{PAD}{TPD}$$

$$TPD = PAD + BHBP + SB$$

Sumber: Halim (2001:24)

Keterangan:

DDFD = Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah

PAD = Realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah

BHBP = Bagi Hasil Bukan Pajak

SB = Subsidi dari pusat

TPD = Total Penerimaan Daerah

##### 3. Persamaan Linier Sederhana

$$\hat{Y} = a + bX$$

Keterangan:

$\hat{Y}$  = Variabel dependen (terikat)

$\alpha$  = intersep

$\beta$  = slope

X = Variabel independen (bebas)

➤ Perumusan Hipotesis

a. Hipotesis Nol ( $H_0$ ) : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara PDRB terhadap kemandirian fiskal daerah Kabupaten Jember

b. Hipotesis Kerja ( $H_1$ ): Terdapat pengaruh yang signifikan antara PDRB terhadap kemandirian fiskal daerah Kabupaten Jember ➤ Kriteria Pengujian

1. Jika t hitung < t tabel, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak; Jika t hitung > t tabel, maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak

2. Jika Probabilitas > 0,05 maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang nyata antara PDRB dengan kemandirian fiskal daerah; Jika probabilitas < 0,05 maka  $H_1$  diterima dan  $H_0$  ditolak, berarti ada pengaruh nyata antara PDRB dengan kemandirian fiskal daerah.

##### 4. Posisi Fiskal

Untuk mencari koefisien elastisitas PAD terhadap PDRB

$$e = \frac{\Delta PAD}{\Delta PDRB}$$

Sumber: Halim, (2001:26)

Keterangan:

$\Delta PAD$  = rata-rata pertumbuhan PAD

$\Delta PDRB$  = rata-rata pertumbuhan PDRB

##### 5. Proyeksi (Forecasting)

$$\hat{Y} = a + bX$$

$\hat{Y}$  = nilai tren (forecasting)

$\alpha$  = bilangan konstan

$\beta$  = koefisien kecondongan garis trend

X = mewakili waktu (tahun)

Data yang digunakan adalah realisasi penerimaan PDRB dan PAD tahun 2007-2011. Tahun yang akan dianalisis adalah tahun ganjil yaitu lima tahun sehingga X dimulai dari -2, -1, 0, 1, 2. Untuk mencari a dan b

$$a = \frac{\sum Y}{n} \quad b = \frac{\sum XY}{\sum X^2}$$

Sumber: Subagyo (1986:33-34)

#### Analisis Tipologi Klassen

Tujuan dari analisis ini adalah untuk memetakan potensi daerah secara sektoral yang didasarkan pada data PDRB. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah:

1. Menghitung rata-rata PDRB per sektor
2. Menghitung rata-rata sektor
3. Menghitung laju pertumbuhan PDRB dan masing-masing sektor
4. Mengklasifikasikan masing-masing sektor ke dalam matriks seperti berikut

Tabel 3.1 Kategori Sektor Berdasarkan Tipologi Klassen

Rata-rata kontribusi sektoral terhadap PDRB	$Y_{SEKTOR} \geq Y_{PDRB}$	$Y_{SEKTOR} \leq Y_{PDRB}$
	$r_{SEKTOR} \geq r_{PDRB}$	$r_{SEKTOR} \leq r_{PDRB}$
Rata-rata Laju Pertumbuhan Sektoral	<b>Unggulan</b>	<b>Berkembang</b>
	<b>Potensial</b>	<b>Terbelakang</b>

Sumber: Mahmudi (2010:53)

Keterangan:

$Y_{sektor}$  = rata-rata sektor i

$Y_{PDRB}$  = rata-raa PDRB

$r_{sektor}$  = laju pertumbuhan sektor i

$r_{PDRB}$  = laju pertumbuhan PDRB

### Hasil Penelitian

#### Pengaruh PDRB Terhadap Kemandirian Fiskal Daerah Kabupaten Jember

Dalam menghitung pengaruh PDRB terhadap kemandirian fiskal daerah digunakan analisis regresi yang menggunakan data laju pertumbuhan PDRB dengan DDFD seperti berikut.

Tabel 4.1 Rata-rata Derajat Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan PDRB

Tahun	DDFD	PDRB
2007	0,08013	5,98
2008	0,10655	11,83
2009	0,10086	5,55
2010	0,09968	6,05
2011	0,09695	7,00
<b>rata-rata</b>	<b>0,09683</b>	<b>7,28</b>

Sumber: data sekunder yang diolah (2013)

Dari hasil perhitungan DDFD dan PDRB tersebut, kemudian dianalisis menggunakan analisis regresi menggunakan software SPSS 17 yang mana hasilnya seperti berikut.

Tabel 4.2 Hasil Analisis Regresi

Variabel	Koefisien Regresi	t hitung	Prob Signifikan
Konstanta	8,186		
PDRB	0,206	1,097	0,353

$R^2$	0,286		
N	5		

Sumber: Hasil perhitungan SPSS 17 (2013)

Tabel tersebut menjelaskan bahwa hasil dari analisis regresi menyatakan bahwa

$$Y = 8,186 + 0,206 X$$

Artinya koefisien regresi sebesar 0,206 menyatakan bahwa setiap kenaikan PDRB sebesar satu rupiah akan dapat meningkatkan DDFD sebesar Rp 0,206. Koefisien determinasi sebesar 0,286 berarti bahwa 28,6% kemampuan fiskal daerah Kabupaten Jember dapat dijelaskan oleh faktor PDRB sedangkan 71,4% dipengaruhi oleh faktor lainnya yang tidak dimasukkan dalam model ini. Berdasarkan t hitung analisis yaitu sebesar 1,097 menyatakan bahwa t hitung < t tabel maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Begitupun dengan hasil probabilitas yaitu sebesar 0,353 menyatakan bahwa prob > 0,05 maka tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara PDRB dengan kemandirian fiskal daerah.

Hasil regresi tersebut menunjukkan bahwa nilai PDDRB selama lima tahun terakhir yaitu tahun 2007-2011 kurang memberikan makna terhadap kemandirian fiskal daerah Jember, hal ini disebabkan karena laju pertumbuhan ekonomi masih relatif lamban. Pertumbuhan PDRB mempunyai peran yang lemah terhadap peningkatan PAD. Hal ini terbukti dari posisi fiskal yang menyatakan bahwa peningkatan 1% PDRB hanya mampu meningkatkan PAD sebesar 2,89%.

Pada umumnya setiap daerah memiliki sumber daya alam yang cukup memadai dan bahkan sangat potensial, namun apabila hal tersebut tidak digunakan dengan sebaik-baiknya maka hasilnya akan sia-sia belaka. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, meningkatkan PAD tidak harus selalu menekankan pada perolehan pajak dan retribusi daerah saja karena hal tersebut secara tidak langsung akan membebani masyarakat dengan maksud pencapaian target dari pajak dan retribusi. Pemerintah harus dapat terus berpikir untuk mengelola potensi sumber daya alam yang ada dengan memanfaatkan secara maksimal sumber daya manusia yang telah ada dengan pelatihan ataupun dengan mendatangkan tenaga ahli asing dengan imbalan jasa sesuai dengan ketentuan yang lazim berlaku.

#### Pemetaan Potensi Sektoral PDRB

Pemetaan ini dilakukan untuk mengetahui sektor-sektor apa yang menjadi prioritas pemerintah daerah Kabupaten Jember dalam meningkatkan PDRB. Berdasarkan perhitungan tipologi kelas per sektor PDRB Kabupaten Jember tahun 2007-2011, didapatkan hasil seperti berikut.

Rata-rata kontribusi sektoral terhadap PDRB	$Y_{SEKTOR} \geq Y_{PDRB}$	$Y_{SEKTOR} \leq Y_{PDRB}$
Rata-rata Laju Pertumbuhan Sektoral	$r_{SEKTOR} \geq r_{PDRB}$	$r_{SEKTOR} \leq r_{PDRB}$
$r_{SEKTOR} \geq r_{PDRB}$	<b>Unggulan</b> Perdagangan, hotel, & restoran	<b>Berkembang</b> Industri Pengolahan; Pengangkutan & komunikasi; Jasa-jasa
$r_{SEKTOR} \leq r_{PDRB}$	<b>Potensial</b> Pertanian	<b>Terbelakang</b> Listrik, gas, & air bersih; Pertambangan & penggalian; Bangunan; Keuangan, persewaan, & jasa perusahaan

Sumber: Hasil perhitungan Klassen (2013)

Gambar 4.1 Identifikasi Masing-masing Sektor PDRB

Dari hasil tersebut, nampak bahwa sektor perdagangan, hotel, dan restoran menjadi sektor yang diunggulkan di Kabupaten Jember, terutama pada subsektor perdagangan. Sektor ini menjadi unggulan karena pertumbuhan sektor tersebut tinggi dan kontribusinya terhadap PDRB besar.

Berada di kategori potensial, berarti sektor pertanian memiliki kontribusi yang besar terhadap PDRB namun memiliki pertumbuhan yang lambat. Kabupaten Jember yang dikenal sebagai lumbung berasnya Provinsi Jawa Timur dan mayoritas masyarakatnya bekerja dibidang usaha tani, lantas itu tidak membuat sektor pertanian menjadi yang diunggulkan. Hal ini dikarenakan susah memprediksi produksi yang terus menerus menurun. Banyak sebab yang menjadikan sektor ini menjadi kurang dominan, diantaranya adalah faktor alam yaitu cuaca yang susah diprediksi, kurangnya modal bagi petani, serta belum optimalnya kelembagaan petani.

#### Proyeksi (Forecasting) PDRB dan PAD

Untuk menghitung peramalan ini peneliti menggunakan analisis *time series* model *least squares* yang dimaksudkan untuk meramalkan kecenderungan PDRB dan PAD untuk lima tahun ke depan yaitu tahun 2012-2016, sehingga nantinya dapat dilakukan perencanaan yang matang bagi pemerintah Kabupaten

Jember dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Berikut rincian perhitungannya.

#### a. Proyeksi PDRB

Tabel 4.3 Hasil Proyeksi PDRB

Tahun	Realisasi	Tahun	Proyeksi
2007	9.226.767,89	2012	13.118.606,48
2008	10.319.002,73	2013	13.868.312,01
2009	10.891.607,20	2014	14.618.017,54
2010	11.550.549,44	2015	15.367.723,06
2011	12.359.522,18	2016	16.117.428,59

Sumber: Hasil penelitian (2013)

Dari tabel tersebut, hasil proyeksi menyatakan bahwa nilai PDRB tahun 2012-2016 mengalami peningkatan, bahkan jauh lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

#### b. Proyeksi PAD

Tabel 4.4 Hasil Proyeksi PAD

Tahun	Realisasi	Tahun	Proyeksi
2007	89.304.961	2012	200.531.932
2008	136.470.706	2013	220.902.951
2009	135.022.286	2014	241.273.970
2010	153.802.037	2015	261.644.989
2011	182.494.390	2016	282.016.008

Sumber: Hasil Penelitian (2013)

Berdasarkan tabel tersebut, proyeksi realisasi PAD selama lima tahun ke depan yaitu tahun 2012-2016 mengalami peningkatan sekitar Rp 20 juta tiap tahunnya.

Dari kedua hasil analisis tersebut dapat mengindikasikan bahwa apabila PDRB mengalami peningkatan maka dapat memberikan nilai yang berarti bagi tingkat kemandirian fiskal daerah Kabupaten Jember. Apabila dilihat dari posisi fiskal, jika 1% PDRB mampu meningkatkan PAD sebesar 2,89% maka diperlukan sekitar 19% bagi PDRB agar mampu meningkatkan kemandirian fiskal Kabupaten Jember.

#### Upaya Pemerintah Dalam Meningkatkan PDRB

Keberhasilan otonomi daerah diperlukan kesiapan pemerintah daerah di segala bidang, terutama kesiapan sumber daya manusia yang mampu menjawab tantangan-tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah untuk memberdayakan potensi daerah yang ada sehingga dari segi keuangan yang merupakan unsur utama dalam menjalankan pemerintahan daerah dapat dicapai kemandirian. Berikut merupakan upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan PDRB guna menuju kemandirian fiskal.

1. Pembangunan dan pengembangan objek wisata. Sebagai salah satu kabupaten yang memiliki

keindahan alam yang luar biasa, pembangunan objek wisata menjadi daya tarik tersendiri bagi pemerintah. Mengingat bahwa dengan berkembangnya objek wisata yang ada di Jember menjadi lebih baik maka akan dapat meningkatkan perekonomian Jember, tidak hanya satu sektor melainkan ini akan berdampak pada peningkatan semua sektor.

2. Investasi. Investasi memiliki peran yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi, terutama disituasi global seperti sekarang ini dimana seseorang dituntut untuk mampu bersaing secara global menjadi manusia yang lebih berkualitas serta memiliki keterampilan yang cerdas, kreatif, dan inovatif. Hal ini yang menjadi upaya pemerintah untuk dapat memasukkan investor sebanyak-banyaknya agar berkeinginan menanamkan modalnya. Oleh karena itu, pemerintah berupaya memberikan pelayanan yang terbaik kepada para investor serta memberikan jaminan kemudahan dan keamanan.
3. Pemberian modal usaha kepada masyarakat. Berlimpahnya sumber daya alam dan manusia di Kabupaten Jember tidak serta merta membuat masyarakat sejahtera. Sebab, masyarakat kurang bisa memanfaatkan potensi tersebut karena terhambat oleh modal. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Jember berupaya untuk memberikan modal kepada masyarakat, tidak hanya berupa uang ataupun barang yang dibutuhkan melainkan juga modal pendidikan serta pelatihan atau pemberdayaan khususnya kepada petani agar mereka dapat berkembang menjadi lebih baik lagi.

### Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut.

- a. Hasil analisis regresi menyatakan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara PDRB terhadap kemandirian fiskal daerah Kabupaten Jember. Lambatnya laju pertumbuhan PDRB menyebabkan walaupun ada peningkatan di PDRB namun tidak tampak pada peningkatan PAD;
- b. Pemetaan potensi secara sektoral dari masing-masing sektor PDRB menunjukkan bahwa sektor perdagangan, hotel, dan restoran berada dikategori sektor unggulan;
- c. Proyeksi PDRB dan PAD selama lima tahun ke depan yaitu tahun 2012-2016 mengalami peningkatan yang signifikan. Diharapkan dengan adanya peningkatan PDRB dapat pula meningkatkan kemandirian fiskal daerah Kabupaten Jember sebab apabila dilihat dari posisi fiskalnya, masih dibutuhkan sekitar 19% dalam meningkatkan PDRB guna menuju kemandirian fiskal.

d. Upaya yang dilakukan pemerintah dalam meningkatkan PDRB antara lain lebih meningkatkan pembangunan dan pengembangan objek wisata yang ada di Jember, sebab apabila objek wisata ini menjadi lebih baik maka akan berdampak pada baiknya pendapatan masyarakat juga sehingga memulihkan perekonomian Kabupaten Jember. Selain itu meningkatkan investasi dengan menarik minat investor melalui pemberian pelayanan yang terbaik serta jaminan kemudahan dan keamanan. Pemberian modal usaha kepada masyarakat juga dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat dapat bekerja lebih baik lagi, selain itu pemerintah juga memberikan modal berupa pelatihan dan pendidikan khususnya bagi petani agar lebih berkembang.

Berdasarkan pembahasan analisis hasil dan kesimpulan di atas maka peneliti mengajukan beberapa saran yaitu:

1. Pemerintah diharapkan melakukan kebijaksanaan penganggaran daerah dengan sebaik-baiknya. Artinya pengumpulan dan penggunaan dana harus disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah. Pendapatan haruslah selalu meningkat, sedangkan pengeluaran haruslah dilakukan seefisien mungkin. Dengan kata lain, seluruh proses anggaran harus terkoordinasi dengan rapi sehingga mampu untuk membiayai pembangunan tanpa harus selalu menggantungkan pada dana bantuan dari pemerintah pusat;
2. Lebih meningkatkan potensi-potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Kabupaten Jember. Sebab peningkatan PAD tidak hanya selalu dengan menggenjot pajak dan retribusi daerah saja akan tetapi juga dapat ditingkatkan dari sektor-sektor sumber daya alam yang ada di Kabupaten Jember. Mulai dari peningkatan sektor pertanian yang menjadi tulang punggung mayoritas penduduk Jember hingga peningkatan sektor pertambangan yang seharusnya menjadi produk unggulan Jember. Dengan meningkatkan semua sektor yang ada maka dapat dipastikan Kabupaten Jember akan menjadi kabupaten yang lebih mandiri;
3. Pemerintah Kabupaten Jember bersama stakeholder terkait harus terus menjaga trend positif pertumbuhan PDRB Kabupaten Jember dengan cara mempertahankan sektor unggulan dan membangun sektor terbelakang, berkembang serta potensial. Hal ini perlu dilakukan agar dapat memacu kontribusi dan pertumbuhan sektornya terhadap PDRB;
4. Terkait dengan peran pemerintah, di masa yang akan datang diharapkan peran unsur-unsur pembangunan nonpemerintah harus menempati porsi yang lebih besar, sedangkan aparat pemerintah lebih berada pada posisi memfasilitasi dan mengakomodasi kebutuhan unsur-unsur tersebut

dalam melaksanakan pembangunan atau dengan kata lain adanya pemberdayaan terhadap masyarakat. Hal ini perlu dilakukan dengan tujuan untuk memperbesar keterlibatan dan rasa memiliki masyarakat sehingga dalam jangka panjang diharapkan bisa menuju ke arah kemandirian masyarakat.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku:**

- Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Pengelolaan Pendapatan & Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Bungin, Burhan. 2008. *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: PT. Indeks.
- Halim, Abdul. 2001. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Hanafi, Imam dan Mugroho, Tri Laksono. 2009. *Desentralisasi Fiskal: Kebijakan Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Di Indonesia*. Malang: UB Press.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Moleong. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Santoso, Singgih. 2004. *SPSS Versi 10 Mengolah Data Statistik Secara Profesional*. Jakarta: Elex Media Komputindo Kelompok Gramedia
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal Dan Keuangan Daerah Dalam Otonom*. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Subagyo, Pangestu. 1986. *Forecasting: Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE.
- Widjaja. 2003. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Widjaja. 2011. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

##### **Peraturan Perundang-undangan:**

- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan daerah